



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI BALI**

Nomor:

--	--	--	--

(disi oleh petugas)

**FORMULIR PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA
INFORMASI**

A. IDENTITAS PEMOHON

Nama:		Alamat Lengkap Jalan:	
Laki-laki/Perempuan/Badan Hukum (lingkari salah satu)		Kecamatan:	Kabupaten/Kota: <small>Kota</small>
.....		Provinsi:	Kode Pos:
Tempat / Tanggal Lahir:	Pekerjaan:	Agama:	Kewarganegaraan:
Nomor Kontak Rumah:	Kantor:	HP:	Email:
Tanda Bukti Identitas: KTP/SIM/Paspor/Akta Pendirian (lingkari salah satu)		No. Identitas	

B. IDENTITAS KUASA PEMOHON (jika ada)

Nama:		Alamat Lengkap Jalan:	
Laki-laki/Perempuan/Badan Hukum (lingkari salah satu)		Kecamatan:	Kabupaten/Kota: <small>Kota</small>
.....		Provinsi:	Kode Pos:

C. MENGENAI PERMOHONAN INFORMASI

Nama Badan Publik:	Unit Kerja:	Alamat:
Informasi yang Dimohonkan: (Gunakan lembar tambahan apabila tidak cukup)	Tanggal Permohonan:	Pejabat/Petugas yang Menerima: (Nama dan Jabatan)
Jawaban atas Permohonan Informasi:	Tanggal Jawaban:	Pejabat yang Menandatangani Jawaban: (Nama dan Jabatan)
Alasan Keberatan:	Tanggal Keberatan:	Pejabat/Petugas yang Menerima: (Nama dan Jabatan)

Tanggapan atas Keberatan:	Tanggal Tanggapan:	Pejabat yang Menandatangani/Tanggapan: (Nama dan Jabatan)
---------------------------	--------------------	--

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi : (berikan tanda “√” terhadap pilihan yang sesuai)

Atas PPID menolak permohonan informasi dengan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud di dalam pasal 17 UU KIP

Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud di dalam pasal 9 UU KIP

Atas PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon

Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atas PPID atas keberatan

Pengenaan biaya yang tidak wajar

Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur di dalam UU KIP

D. DOKUMEN KELENGKAPAN PERMOHONAN (berikan tanda “√” jika ada)

<input type="checkbox"/>	Pemohon Perorangan : KTP/SIM/Paspor/Akta Pendirian	<input type="checkbox"/>	Pemohon Badan Hukum: Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum	<input type="checkbox"/>	Pemohon diwakili oleh kuasa: Surat Kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberikuasa dalam hal pemohon mewakili kelompok orang
<input type="checkbox"/>	Surat Permohonan/ formulir permohonan yang disediakan Badan Publik/ tanda terima	<input type="checkbox"/>	Pemberitahuan tertulis	<input type="checkbox"/>	lawaban PPID terhadap informasi Permohonan informasi
<input type="checkbox"/>	Surat pengajuan keberatan/ formulir keberatan yang disediakan Badan Publik/ tanda terima	<input type="checkbox"/>	Tanggapan Atas PPID atas keberatan		

Dokumen Pendukung Lainnya

Pernyataan Pemohon

- 1 Dengan ini saya menyatakan bahwa sengketa informasi yang saya ajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Bali tidak sedang diproses atau belum pernah diputus oleh lembaga peradilan dan tidak sedang diproses atau difasilitasi oleh lembaga penyelesaian sengketa lainnya.
- 1 Bahwa saya bersedia mengikuti seluruh proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Provinsi Bali
- 1 Apabila pernyataan yang saya berikan di atas tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka Komisi Informasi Provinsi Bali berhak untuk menolak permohonan penyelesaian sengketa yang saya ajukan atau menghentikan seluruh proses penyelesaian sengketa informasi ini

Demikian permohonan penyelesaian sengketa informasi ini saya ajukan dengan sadar tanpa pengaruh atau paksaan dari pihak manapun.

Pemohon	Komisi Informasi Provinsi Bali
---------	--------------------------------